



PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH (KNID) YOGYAKARTA

PEMERSATU:  
Sri Sultan HB IX  
dan Paku Alam VIII  
bersama anggota  
PPD usai sidang  
di Kepatihan  
Yogyakarta.

BPAD DIY

## Otoritas Tentukan Dasar Pemerintahan di Yogyakarta

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta didukung Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. KNID Yogyakarta memiliki otoritas untuk menentukan dasar-dasar pemerintahan di Yogyakarta.

**PEMBENTUKAN** Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta didasarkan pada pidato Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno. Pidato tersebut dinyatakan pada 23 Agustus 1945.

Presiden Soekarno menyampaikan sejumlah poin penting dalam pidato yang disirkan melalui radio. Di antaranya, memerintahkan rakyat Indonesia di seluruh daerah untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Sejatinya, ada satu hal lagi yang ditekankan yakni pembentukan PNI. Namun, hal tersebut ditentang oleh Syahrir dan kawan-kawannya dengan persetujuan Mohammad Hatta.

Perintah pembentukan KNI dan BKR pun dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk, pembentukan KNIP segera diselenggarakan di Yogyakarta.

Pembentukan KNID di Yogyakarta didukung Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Allam VIII yang merupakan pemegang kekuasaan di wilayah Yogyakarta. KNID di Yogyakarta pun terbentuk.

Berdasar Suratmin dalam *Mengungkap Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Peranan Komite Nasional Indonesia Daerah Tahun 1945-1950)*, dinyatakan pembentukan KNID Yogyakarta diprakarsai kelompok nasionalis. Kelompok ini mempunyai hubungan yang erat dengan para pemimpin nasionalis di Jakarta. Salah seorang di antaranya yakni Moh. Asrar.

Bersama Marlan, Asrar mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Kooti Hokokai dan sejumlah tokoh lainnya. Pertemuan dilaksanakan di wilayah Ngabean, Yogyakarta. Pertemuan dipimpin R.M. Sosrosudirdjo. Lokasi pertemuan merupakan bekas Kantor Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat berlangsung alot. Selama rapat terjadi berbagai perbedaan pendapat. Terutama antara kelompok bawah tanah dengan kelompok Hokokai, yaitu Wiwoho dan Sudarisman Purwokusumo.

Asrar, yang termasuk kelompok bawah tanah, sebelumnya mendapat pesan dari Sartono untuk tidak boleh bertentangan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sebab, saat itu Sultan menjabat sebagai ketua Kooti Hokokai. Sejenis Himpunan Kebaktian Rakjat Djawa. Sultan mengambil kendali. Sultan HB IX dengan bijaksana menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul.

Sebagai ketua Kooti Hokokai, Sultan HB IX berhasil mengarahkan kedua kelompok untuk mencapai kesepakatan. Akhirnya, terbentuklah KNID Yogyakarta.

KNID Yogyakarta memiliki otoritas untuk menentukan dasar-dasar pemerintahan di Yogyakarta. Selain itu, KNID Yogyakarta berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum sebagai badan perjuangan. Namun, pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari Sultan HB IX dan Paku Alam IIIV sebagai penguasa di Yogyakarta.

Awalnya KNID Yogyakarta beranggotakan 32 orang. Namun, jumlahnya bertambah. Penambahan anggota didasarkan kebutuhan praktis revolusi yang menghendaki masuknya lebih banyak kelompok masyarakat. Keanggotaan KNID Yogyakarta akhirnya berjumlah 83 orang, termasuk 3 penasihat.

Tiga penasihat KNID Yogyakarta saat awal

pembentukan awal September 1945 adalah B.P.H. Purboyo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr Sukiman.

Dari seluruh anggota KNID Yogyakarta, dapat dibagi beberapa kelompok berdasarkan golongan atau organisasi. Yakni, kelompok Kooti Hokokai yang berjumlah 16 orang. Kelompok ini dipimpin Sultan HB IX. Anggotanya sebagian besar menjadi abdi dalem Kepatihan yang berada di bawah perintah Sultan HB IX.

Kelompok Perkumpulan Kawulo Ngayogyakarta (PKN) berjumlah 7 orang. Kelompok ini bawah pimpinan B.P.H. Suryodiningrat. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Sultan HB IX.

Kelompok Polisi, mantan PETA, dan mantan Heiho berjumlah 10 orang. Polisi merupakan kekuatan bersenjata pada waktu proklamasi kemerdekaan.

Kelompok Taman Siswa berjumlah 3 orang. Mereka dipimpin Ki Hadjar Dewantara, yang dikenal sebagai golongan nasionalis yang gigih. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Sultan HB IX.

Kelompok Islam berjumlah 12 orang. Mereka terdiri atas tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan mengadakan kunjungan ke lembaga-lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah.

Kelompok wartawan berjumlah 5 orang. Mereka memiliki peran penting dalam menyebarkan nasionalisme.

Kelompok politik berjumlah 16 orang. Mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan pada zaman Belanda, yang pada masa penjajahan Jepang, tidak dapat melanjutkan gerakan politiknya. Mereka selalu menjalin hubungan baik dengan kawan-kawannya di Yogyakarta maupun di di luar Yogyakarta.

Kelompok Promotor Pemuda Nasional berjumlah 2 orang. Kelompok BPU berjumlah 1 orang. Kelompok Angkatan Muda Pathook berjumlah 1 orang. Sebanyak 12 anggota lainnya berasal dari kelompok-kelompok lainnya.

Kelompok 8, 9, dan 10 itu pada zaman Jepang berjuang di bawah tanah, tetapi pada waktu proklamasi kemerdekaan diumumkan, mereka menjadi penggerak rakyat secara langsung. Sesuai dengan sifatnya gerakan di bawah tanah, mereka tidak memiliki organisasi formal yang teratur, tetapi lebih merupakan paguyuban atau kerukunan yang dihubungkan oleh ikatan batin dan cita-cita kemerdekaan. Mereka biasanya bergabung dengan kesatuan-kesatuan kecil sesuai dengan gagasan partai kader. Anggota kesatuan kecil itu masing-masing membentuk kesatuan kecil baru yang tidak saling mengenal. Dengan demikian cita-cita mereka tersebar luas tanpa diketahui pusatnya. Jadi, meskipun mereka tidak memiliki organisasi resmi yang kuat, tetapi mereka mampu menggerakkan rakyat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Hampir semua pemimpin kelompok masyarakat yang menjadi anggota KNID Yogyakarta memiliki hubungan dengan Sultan HB IX. Mereka menjalin hubungan melalui jalur birokrasi, politik, dan sosial.

Semula posisi ketua KNID semula dipilih secara demokratis. Namun, kemudian ada instruksi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Kasman Singodimejo agar ketua KNID diambil dari orang-orang Daidantyo. Anggota yang dianggap memenuhi syarat adalah Muhammad Saleh yang merupakan Daidantyo dari Bantul. Saleh pun memangku jabatan sebagai ketua KNID Yogyakarta. (\*)

### PENASIHAT DAN ANGGOTA KNID YOGYAKARTA

#### Penasihat:

1. B.P.H. Purboyo
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. Dr Sukiman

#### Anggota:

1. Moh. Saleh
2. K.R.T. Hardjodiningrat
3. Mr Tandiono Manu
4. K.R.T. Josodiningrat
5. Wiwoho
6. B.R.M. Sukadari
7. Marlan
8. Mr S. Purwokusumo
9. H Farid Ma'ruf
10. Siswoharsojo
11. D.D. Susanto
12. R. Atmodarminto
13. Adisumarto
14. Wardoyo
15. Asrar
16. Saebani
17. S. Parman
18. Mochtar
19. Hertog
20. R.M. Sosrosudirdjo
21. B.P.H. Suryodiningrat
22. Sudarsono
23. Sudarto
24. Sukiman
25. Oemar Slamet
26. Mawardi
27. Reksosiswo
28. R.H. Hadjid
29. K.P.H. Nototaruno
30. Ramelah
31. R. Iskandar
32. Kertaya
33. Mr. K.R.T. Brotokusumo
34. R. Mawal
35. Hardjosubroto
36. R.M. Sumarmadi
37. K.R.T. Notoyudo
38. Wijono
39. Nj. Sutomo
40. Ni. Sutanto
41. Ismullah
42. K.R.T. Honggowongso
43. Soetomo
44. Moedjodo
45. Sudarsono
46. Sismadi
47. Mr Wijono
48. R.M. Gondojuwono
49. Hadisumarto
50. M.R. Kasmat
51. P.B.H. Hadinegoro
52. Bedjo
53. Adham Basjari
54. R.L. Himodigdojo
55. Zarkasi
56. M. Latjuba
57. Moh. Tauchid
58. Dr. Sumardi
59. K.R.T. Martohusodo
60. Ngatidjo
61. Sumantoro
62. Mr. Sorjotjokro
63. Lagiono
64. Djajengkarso
65. R. Rudjito
66. H. Abdul Hamid
67. Ir. K.R.T. Dipokusumo
68. R.L. Sastroseputro
69. Ki Sudarminto
70. R. Sugardo
71. R. Darmosugito
72. Wali Alfatah
73. Suhamir
74. Wigjnosuwarno
75. Soetomo
76. K.R.M.T. Suryoningrat
77. Djaludi Nasution
78. Oemar Djoy
79. Dr. Sutjipto
80. Sardjono
81. Mr Sjamudin
82. Sudiro
83. ---

GRAFIS: HERRPRI KARTUN/RADAR JOGJA



DEKAT: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Presiden Indonesia Soekarno.

## Tugas Menjaga Keamanan

Pembentukan KNIP Yogyakarta langsung disusul pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yogyakarta. BKR Yogyakarta resmi terbentuk pada 1 September 1945.

BKR yang merupakan bagian dari kegiatan Badan Penolong Korban-Korban Perang (BPKKP). Anggota BKR Yogyakarta berasal dari sejumlah Pembela Tanah Air (Peta), Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Berani Mati, Hizbullah, Sabillillah, Barisan Pelopor, Tentara Rakyat Mataram, dan lainnya.

BKR Yogyakarta memiliki tanggung jawab khusus. BKR Yogyakarta ber-

tugas menjamin ketenteraman dan keamanan rakyat di Yogyakarta. Tokoh-tokoh BKR antara lain Umar Slamet, S. Parman, Sukardi, Oemar Joy, dan Sudarsono.

BKR dipelopori oleh BPU. BPU merupakan gabungan badan-badan pemuda yang pada Agustus 1945 diundang oleh Sultan HB IX. Mereka diundang untuk mengikuti pertemuan dengan tujuan membentuk gabungan pemuda, yang oleh Sultan HB IX diberi tugas menjaga keamanan.

BPU dipimpin oleh Umar Slamet, S. Parman, dan Sudharto. Dengan demikian, Sultan HB IX memiliki hubungan yang sangat dengan BKR. (\*)



SINERGI: Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X bersama anggota DPRD DIY.

## Pegang Teguh Etika

**KOMITE** Nasional Indonesia Daerah (KNID) merupakan "cikal bakal" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saat ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DPRD DIY menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi DIY.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berharap Pemprov DIY dan DPRD DIY dapat membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut untuk mengoptimalkan visi bersama. Komunikasi yang baik penting dilakukan agar manajemen pemerintahan terselenggara dengan baik dan optimal tanpa mengesampingkan adanya unsur-unsur lain.

Hamengku Buwono X juga berharap DPRD DIY dapat melaksanakan ketugasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. "DPRD

memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, anggota dewan hendaknya dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan memegang teguh etika," jelas Gubernur dalam pelantikan pimpinan DPRD DIY pada 2 September lalu.

Hamengku Buwono X menyatakan, DPRD DIY harus mengoptimalkan fungsi keterwakilan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain itu, tetap teguh dan kritis terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat.

"Kami berharap DPRD berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berjalan sesuai anggaran," tegas Hamengku Buwono X. (\*)